SiAkun: Jurnal Skripsi Akuntansi
Vol. 1 No. 1 (Mei 2023) **eISSN: XXXX-XXXX**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Karo)

Emiya Sri Hagana Br. Brahmana, Arthur Simanjuntak, Mitha Christina Ginting
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
Email: emiyabrahmana00@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.46880/siakun.V1N1.H51-60

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo). Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 48 orang. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian diperoleh bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai thitung (2.713) > nilai ttabel (2.015) atau nilai signifikansi t (0.009) lebih kecil < alpha (0.05). Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai thitung (3.429) > nilai ttabel (2.015) atau nilai signifikansi t (0.001) lebih kecil < alpha (0.05). Penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai thitung (2.955) > nilai ttabel (2.015) atau nilai signifikansi t (0.005) lebih kecil < alpha (0.05). Sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai Fhitung (20.477) > nilai Ftabel sebesar 2.820 atau nilai signifikansi F (0.000) < nilai alpha (0.05).

***Kata Kunci**: Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Administrasi, Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*

PENDAHULUAN

Suatu pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan dan pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan. Kedua hal tersebut akan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan disesuaikan dengan keperluan suatu daerah dan kemampuan pendapatan yang dihasilkan dari daerah tersebut. Jika semakin besar keperluan atau kebutuhan suatu daerah maka semakin besar pula pengeluaran daerah, sehingga dengan adanya pendapatan yang maksimal diperoleh dari daerah tersebut tentunya akan membantu dalam mengatasi pengeluaran tanpa harus melibatkan bantuan dari pemerintah pusat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 17 ayat 3 bahwa dalam hal anggaran diperkirakan ariabl, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup ariabl tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 17 ayat 4 bahwa dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penggunaannya agar berjalan efisien maupun efektif dapat ditinjau dari kebijakan dalam bidang keuangan daerah berupa kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengelola keuangan daerah, yaitu melakukan pengelolaan dana secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu melakukan sinkronasi atas pencapaian program daerah dalam APBD dengan program yang dimiliki pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan APBD sangat penting untuk dilakukan

agar dalam penggunaannya tepat sasaran. Adapun ariab-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan APBD adalah sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempuranaan ariab administrasi.

Sumber daya manusia atau disebut sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengelola maupun memastikan seluruh kepentingan daerah dapat terpenuhi maupun tepat sasaran. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan aparatur daerah atau ariab. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang ariable ve dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani ariab, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar ariable etik aparatur ariab Zaenuri (2015) mengemukakan bahwa kebijakan pengelolaan aparatur disusun untuk mewujudkan aparatur sipil daerah maupun ariab yang memiliki integritas, ariable ve , netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan ariab bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai ariab perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian dari Ismid, dkk (2020) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBD adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi dalam pemerintah daerah sangat penting untuk dimiliki, karena melalui komitmen seluruh kebijakan maupun aturan dapat dipatuhi maupun dilaksanakan secara bersama-sama, saling bersinergi dalam membangun daerah yang dipimpin, dan lainnya. Menurut Harahap dan Syardiansah (2021) komitmen organisasi adalah sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi. Komitmen organisasi menyiratkan hubungan pegawai dengan organisasi secara aktif karena pegawai yang dapat menunjukkan komitmen tinggi mempunyai keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab lebih untuk keberhasilan organisasi. Dari hasil peneliti tersebut juga ditemukan komitmen organisasi menjadi salah satu ariab yang dapat mempengaruhi kualiltas penyusunan APBD.

Penyempurnaan ariab administrasi juga dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBD. Penyempurnaan ariab administrasi berguna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses administrasi yang dilakukan oleh aparatur daerah. Jika penyempurnaan ariab administrasi tidak dilakukan secara berkala akan menimbulkan kekeliruan atau membuat dokumen tidak tersusun dengan baik. Menurut Rasyid, dkk (2017) penyempurnaan administrasi merupakan perbaikan atas kesalahan, penambahan atas kekurangan, serta pengurangan atas overtivitas administrasi. Oleh karena itu, penyempurnaan administrasi perlu dan harus bagi setiap organisasi agar ariab dan prosedur mampu untuk memaksimalkan kinerja organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melaksankaan penelitian yang berjudul: "**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Karo)**".

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh parsial terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo)?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh parsial terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo)?
3. Apakah penyempurnaan ariab administrasi berpengaruh parsial terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo)?

4. Apakah sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan ariab administrasi berpengaruh simultan terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo)?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu hubungan antara rakyat dengan ariable ve dan ariable ve terhadap eksekutif. Ditinjau dari perspektif hubungan keagenan antara legistlatif terhadap eksekutif, eksekutif adalah agent dan ariable ve adalah principal (Halim dan Abudllah dalam Sholehah, dkk, 2020). Jika dilihat dari perspektif hubungan keagenan ariable ve dengan rakyat, pihak ariable ve merupakan agent yang dapat membela kepentingan rakyat (principal), tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelagasian kewenangan rakyat terhadap ariable ve. Hal tersebut yang seringkali menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun ariable ve, sehingga anggaran cenderung tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan self-interest pihak variabel tersebut. Apabila hal ini terjadi maka besar kemungkinan anggaran yang disahkan adalah suatu alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering dikenal dengan istilah korupsi (Mauro; Keefer dan Khemani dalam Sholehah, dkk, 2020).

Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal pada ariab ariab adalah teori yang akan menjelaskan tentang alasan mengapa pemerintah mempunyai dorongan dalam menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Pemerintah memberikan sinyal kepada masyarakat karena adanya asimetri informasi antara pemerintah terhadap masyarakat (Siagian, 2021).

Sumber Daya Manusia

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: sumber daya manusia (human resources), dan sumber daya non manusia (non-human resources). Sumberdaya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik, potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang dan potensi non fisik adalah kemampuan seorang yang terakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, intelegensia, keahlian, keterampilan dan human relations (Zaenuri, 2015).

Peranan sumber daya manusia dalam suatu instansi pemerintah sangat penting karena penggerak utama seluruh kegiatan atau aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi adalah manusia. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi dimulai dari usaha manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal. Dengan kata lain kinerja organisasi sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya (Sewang, 2021).

Komitmen Organisasi

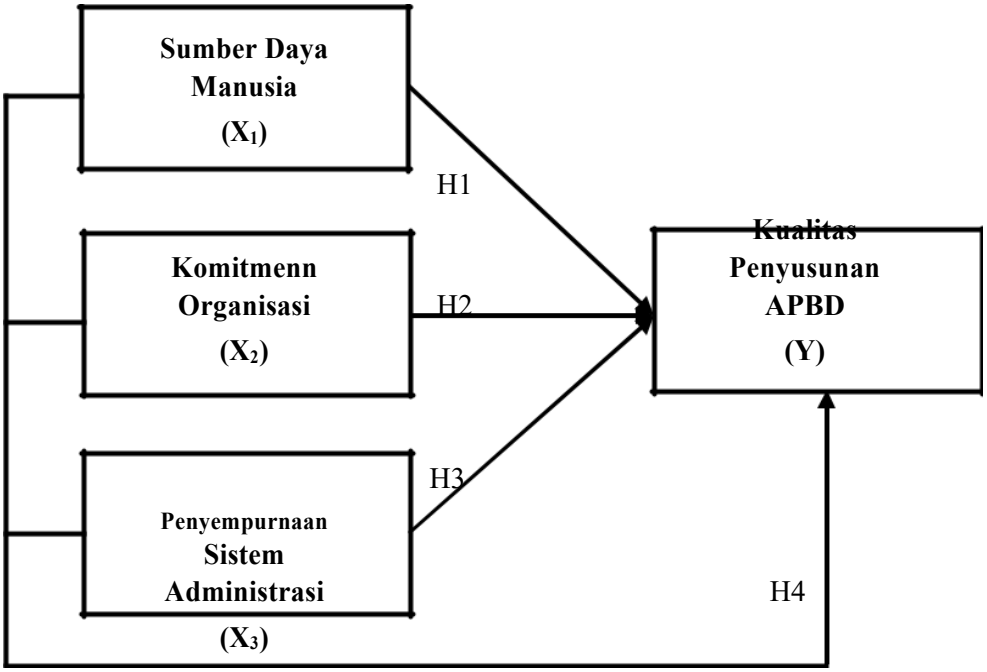
Menurut Sulkarnaim (2016) bahwa komitmen organisasi adalah sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja, adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari unit organisasi kerja. Berdasarkan defenisi diatas, dalam komitmen organisasi tercakup variabel loyalitas

terhadap perusahaan atau instansi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan instansi. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Menurut Rasyid, dkk (2017) bahwa "komitmen organisasi adalah modal untuk membangun organisasi yang baik. Karena dengan adanya komitmen melahirkan kebulatan tekad dalam menggapai sesuatu termasuk optimalisasi terhadap anggaran".

Kerangka Berpikir

Model kerangka berpikir untuk judul penelitian mengenai analisis ariabfaktor yang mempengaruhi kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Kasus pada BPKAD Kabupaten Karo) dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sumber daya manusia atau disebut sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengelola maupun memastikan seluruh kepentingan daerah dapat terpenuhi maupun tepat sasaran. Hal ini dapat terwujud karena adanya kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan aparatur daerah atau ariab. Menurut Sulkarnaim (2016) bahwa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pelatihan yang sesuai dengan yang diperlukan, sehingga sumber daya manusia yang tersedia mampu untuk menjalankan tugasnya dalam meningkatkan pelayanan organisasi terhadap kebutuhan ariab. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang harus dapat diperbaiki maupun dilengkapi, sehingga saat sumber daya manusia yang telah ada siap serta sarana juga telah ada maka dapat digunakan untuk mewujudkan penerapan anggaran berbasis kinerja.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Komitmen organisasi dalam pemerintah daerah sangat penting untuk dimiliki, karena melalui komitmen seluruh kebijakan maupun aturan dapat dipatuhi maupun dilaksanakan secara bersama-sama,

saling bersinergi dalam membangun daerah yang dipimpin, dan sebagainya. Menurut Harahap & Syardiansah (2021) bahwa apabila pekerja merasa jiwanya terikat nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi dalam menyusun APBD yang berkualitas yaitu mampu membiayai program maupun kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga anggaran yang jumlahnya terbatas dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Untuk itu program harus disusun berdasarkan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat

Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Penyempurnaan ariab administrasi berguna meminimalisir timbulnya kesalahan dalam proses administrasi yang dilakukan oleh aparatur daerah. Jika penyempurnaan ariab administrasi tidak dilakukan secara berkala akan menimbulkan kekeliruan atau membuat dokumen tidak tersusun dengan baik. Menurut Sulkarnaim (2016) bahwa apabila penyempurnaan ariab administrasi baik akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja yang baik pula. Sebaliknya, apabila penyempurnaan ariab administrasi buruk maka dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja juga akan buruk.

Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara mengenai fenomena tertentu yang akan diuji kembali kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Ada pengaruh sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

H2 : Ada pengaruh komitmen organisasi secara parsial terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

H3 : Ada pengaruh penyempurnaan ariab administrasi secara parsial terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

H4 :Ada pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan ariab administrasi secara simultan terhadap kualitas penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah pengaruh ariable bebas terhadap ariable terikat, baik positif maupun ariable. Model persamaan dalam regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta0 + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Penyusunan APBD

β0 = Konstanta

β1 = Koefisien Regresi Sumber Daya Manusia

β2 = Koefisien Regresi Komitmen Organisasi

β3 = Koefisien Regresi Penyempurnaan Sistem Administrasi X1 = Sumber Daya Manusia

X2 = Komitmen Organisasi

X3 = Penyempurnaan Sistem Administrasi

ε = Term of Error

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian terbagi atas dua adalah sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) Menurut Siregar (2017) uji signifikansi atau hipotesis parsial digunakan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis parsial, yaitu:
   a. Apabila nilai t-hitung > nilai t-tabel atau nilai signifikansi < alpha (0.05), maka disimpulkan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat;
   b. Apabila nilai t-hitung < nilai t-tabel atau nilai signifikansi > alpha (0.05), maka disimpulkan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) Menurut Siregar (2017) uji signifikansi atau hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis simultan, yaitu:
   a. Apabila nilai F-hitung > nilai F-tabel atau nilai signifikansi < alpha (0.05), maka disimpulkan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat;
   b. Apabila nilai F-hitung < nilai F-tabel atau nilai signifikansi > alpha (0.05), maka disimpulkan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menggunakan nilai R-Square. Nilai R-Square berguna untuk menunjukkan atau mengetahui proporsi variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kriteria dalam koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Apabila R-Square di bawah 0, maka semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat;
2. Apabila R-Square sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat;
3. Apabila R-Square mendekati 1, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan pada pegawai BKAD dan BAPPENDA. Berikut karakteristik responden yang akan dijelaskan berdasarkan jumlah dari masing-masing bagian organisasi (BKAD dan BAPPENDA) yang ada dalam BPKAD Kabupaten Karo.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Bagian Organisasi

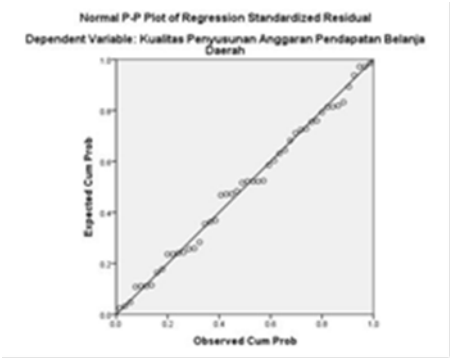
Bagian Organisasi	Jumlah	Persentase
BKAD	25 Orang	52.08%
BAPPENDA	23 Orang	47.92%
Total	**48 Orang**	**100%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Karo

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada penelitian ini menggunakan P-P Plot dan Kolmogorov-Smirnov Test yang dapat dilihat di bawah ini.

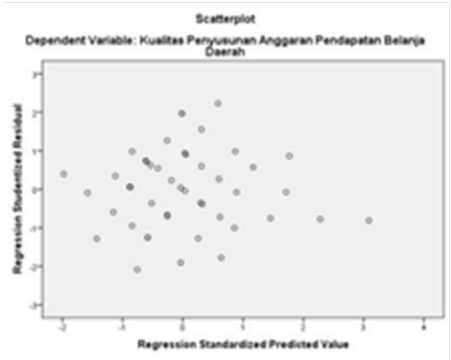


Gambar 2. Uji Normalitas (P-P Plot)
Sumber Hasil Olahan SPSS (2022)

Pada P-Plot di atas menunjukkan bahwa data-data masih mendekati garis diagonal atau tidak ditemukan adanya kecenderungan data tersebut menyebar menjauhi garis tersebut, sehingga disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Scatterplot yang dapat dilihat di bawah ini



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
Sumber Hasil Olahan SPSS (2022)

Pada Scatterplot di atas menunjukkan penelitian ini tidak mengalami adanya gejala heteroskedastisitas, karena ditemukan bahwa data-data mengalami penyebaran ke segala arah atau tidak ada pola yang terbentuk.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas di bawah ini dengan melibatkan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor yang tersedia pada tabel berikut.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sumber Daya Manusia	.738	1.356
Komitmen Organisasi	.846	1.181
Penyempurnaan Sistem Administrasi	.762	1.313

a. Dependent Variable: Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Sumber Hasil Olahan SPSS (2022)

Pada Tolerance variabel sumber daya manusia diperoleh sebesar 0.738, komitmen organisasi sebesar 0.846, dan penyempurnaan variabel administrasi sebesar 0.762 yang lebih besar dari 0.10, serta VIF untuk variabel sumber daya manusia diperoleh sebesar 1.356, komitmen organisasi sebesar 1.181, dan penyempurnaan variabel administrasi sebesar 1.313 yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai thitung (2.713) > nilai ttabel (2.015) atau nilai signifikansi t (0.009) lebih kecil < alpha (0.05).
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai thitung (3.429) > nilai ttabel (2.015) atau nilai signifikansi t (0.001) lebih kecil < alpha (0.05).
3. Penyempurnaan variabel administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai thitung (2.955) > nilai ttabel (2.015) atau nilai signifikansi t (0.005) lebih kecil < alpha (0.05).
4. Sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan penyempurnaan ariab administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, dengan diperoleh nilai Fhitung (20.477) > nilai Ftabel sebesar 2.820 atau nilai signifikansi F (0.000) < nilai alpha (0.05).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BKAD dan BAPPENDA Kabupaten Karo dapat terus meningkatkan keahlian maupun kemampuan dari setiap pegawai dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan pengembangan secara bekerlanjutan, dan mengupayakan sinergitas antar pegawai dapat terus terjalin, serta variabel administrasi dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan setiap dokumen atau laporan disempurnakan secara berkala dengan demikian penyusunan APBD dapat memberikan hasil yang semakin berkualitas.
2. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah variabel faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan APBD, mengingat masih ada 41.7% variabel atau variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Biduri, S. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Jawa Timur: UMSIDA Press

Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi.Yogyakarta: Zahir Publishing

Hardani, dkk. 2017. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Karmanis, & Karjono. 2020. *Perkembangan Teori dan Reformasi Administrasi*. Jawa Tengah: CV. Pilar Nusantara

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2018. *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah "Belanja Daerah*". Kementrian Keuangan, 51(1), 212

Kurniawati, Endah. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management (NEM)

Purnomo, R. A. 2017. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group

Sholehah, N. L. H., Ishak, P., & Zulfaidah. 2020. *Kecurangan Akuntansi: Ditinjau dari Pengendalian Internal, Moralitas dan Personal Culture*. CV AA. Rizky

Siregar, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, R. M., & Syarif, D. 2018. *Komitmen Organisasi*. Makassar: CV Nas Media Pustaka

Zaenuri, M. 2015. *Manajemen SDM di Pemerintahan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Harahap, A. Y., & Syardiansah, S. 2021. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Transparansi Terhadap Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 1161–1168. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16532

Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. S. 2020. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Strukturasi:* Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 2(2), 129–140.

Mustika, M. 2018. *Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi Dan Sanksi Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Provinsi Jambi*. Journal Development, 6(2), 168–177

Rasyid, A., Sari, R. N., & Rasuli, M. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi APBD Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau).* 25, No. 4, 14

Verawaty, V. 2017. *Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan. Akuisisi*: Jurnal Akuntansi, 13(2), 92–107. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.172 Nugraheta, U. R. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi EmpirisPada SKPD Kota Surakarta). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Siagian, B. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Motivasi Sebagai Moderating di Kota Medan*. Tesis Universitas Sumatera Utara

Sulkarnaim. 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reward Terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Sewang, F. 2021. *Pengaruh Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju*. Skripsi Universitas Hasanuddin

Pemerintah Kabupaten Karo. 2021. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*